

Ibu Rumah Tangga di Lampung Dituduh Gelapkan 39 Gram Emas

LAMPUNG UTARA (IM) - Satuan Reserse Kriminal umum (Sat Reskrim) Polres Lampung Utara menangkap seorang ibu rumah tangga berinisial GW (38). Ia dituduh melakukan penipuan dan penggelapan emas 39 gram milik Yunida, warga jalan stasiun Cempaka Banjar Wangi, Kecamatan Kotabumi Utara.

Akibatnya, Yunida, yang masih sahabat tersangka menderita kerugian hingga Rp21,2 juta.

Hal tersebut diungkapkan Kasat Reskrim AKP Eko Rendi Oktama mewakili Kapolres Lampung Utara AKBP Kurniawan Ismail, Rabu (14/6).

Ia melanjutkan, penangkapan GW berdasarkan laporan korban dengan LP /B/ 634/VIII/ 2017/Polres Lampung Utara/Polda Lampung tanggal 2 Agustus 2017.

GW adalah warga jalan Sukarno Hatta Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan, awalnya Selasa 12/5),

sekitar pukul 11.30 WIB mendatangi rumah korban dengan maksud meminjam emas.

Dikarenakan sudah saling kenal baik, korban meminjamkannya dengan perjanjian akan dikembalikan selama satu bulan. Namun, hingga berap kali jatuh tempo, GW tak kunjung mengembalikan, bahkan menghilang.

"Selanjutnya korban melapor ke Polres Lampung Utara," terang kasat.

"Terhadap terduga pelaku baru dapat kita tangkap pada Rabu 13 Juni 2023 pukul 09.00 WIB," katanya.

Ia menjelaskan, pelaku ditangkap di sebuah warung sedang santap pagi Desa Kalibening Raya Kecamatan Abung Selatan oleh anggota Pidum. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolres.

"Barang bukti yang kita sita dari terduga pelaku berupa 1 lembar fotokopi kwitansi dan kini tengah kita lakukan proses pemeriksaan," kata Eko. • **lus**

Polsek Bojongsari Gerebek Warung Penjual Obat Terlarang di Depok

DEPOK (IM) - Jajaran Polsek Bojongsari menggerebek toko penjual obat terlarang daftar 'G' berkedok warung kelontong di Jalan Raya Ciputat-Parung RT 1 RW 1, Bojongsari Baru, Bojongsari, Depok, Jawa Barat pada Selasa (13/6) lalu.

Kapolsek Bojongsari-Sawangan, Kopol Yogi Maulana menjelaskan, jajaran Polsek dan Bhabinkamtibmas dan warga RW 1 saat menggerebek warung kelontong tersebut ditemukan obat terlarang daftar 'G'.

"Saat melakukan sidak menemukan sejumlah obat terlarang daftar 'G' dan mengamankan pemilik warung penjual jamu yang menjual obat-obatan daftar G terse-

but atas nama IM," kata Yogi saat dikonfirmasi, Kamis (15/6).

Yogi menyebut pelaku IM diserahkan ke Polsek Bojongsari untuk prosedur hukum.

"Pelaku IM dibawa diserahkan ke Polsek Bojongsari untuk prosedural hukum yang berlaku," ucapnya.

Sejumlah obat terlarang daftar 'G' disita sebagai barang bukti mulai dari Tramadol hingga Heximer.

"Barang bukti obat terlarang daftar G diantaranya Tramadol 55 strip, Trihexyphenidyl 4 strip, Heximer 79 strip, Alprazolam 45 butir, Grantusif 5 butir, Fasidol 5 butir, Cefadroxil 5 butir, Diazepam 5 butir dan Nierlopan 5 butir," katanya. • **lus**

12 | PoliceLine

FOTO: ANTARA



UNGKAP SINDIKAT PERDAGANGAN SISIK TRENGGILING DI KALIMANTAN

Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) Rasio Ridho Sani (kedua kanan) bersama Direktur Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sustyo Iriono (kanan) saat rilis ungkap kasus perdagangan sisik trenggiling di Kantor SPORC Kalbar di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis (15/6). Gakkum KLHK bersama Ditreskrimsus Polda Kalbar dan BKSDA KLHK menggagalkan penyelundupan 417 kilogram sisik trenggiling (Manis javanica) yang diangkut menggunakan satu unit mobil Daihatsu Luxio Nopol KB 1729 HP dan menangkap tiga pelaku berinisial FAP, MR dan MND di Kalimantan Barat serta satu pelaku berinisial MR di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Kompolnas Minta Polri Jelaskan soal Rumah Anggota Jadi Penampungan Korban TPPO

Polri diminta terbuka kepada media terkait penanganan kasus TPPO itu agar tidak ada kesan pandang bulu dalam menindak jaringan pelakunya.

JAKARTA (IM) - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Polri menjelaskan soal rumah anggotanya menjadi tempat penampungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Lampung.

Polisi sebelumnya menyebut bahwa anggotanya selaku pemilik rumah tersebut menyewakan asetnya kepada orang lain yang sudah menjadi tersangka TPPO.

Meski begitu, Komisioner Kompolnas Poengky Indarti meminta Polri juga menjelaskan kronologi sehingga anggota tersebut menyewakan rumahnya ke pelaku tindak pidana.

"Update dari Polda Lampung bahwa anggota tidak terlibat TPPO cukup melengkap, tetapi perlu ditelusuri bagaimana rumah tersebut bisa disewakan pada orang lain yang ternyata diduga di-

gunakan untuk TPPO," ujar Poengky saat dikonfirmasi, Kamis (15/6).

Ia juga meminta Polri terbuka kepada media terkait penanganan kasus itu agar tidak ada kesan pandang bulu dalam menindak tegas jaringan pelaku TPPO. Kompolnas juga telah melayangkan surat klarifikasi ke Polda Lampung meminta keterangan terkait hal itu.

"Kami masih menunggu perkembangan hasil pengusutan Bidang Propam Polda Lampung," kata Poengky.

Selain itu, Kompolnas juga meminta Polri menjelaskan soal sistem pengawasan internal terkait aset yang di-

miliki anggotanya.

Menurut Poengky, hal itu perlu untuk mengantisipasi agar asetnya anggota Polri tidak disalahgunakan pihak lain.

"Kami juga ingin mengetahui bagaimana pengawasan internal terkait kepemilikan anggota atas rumah dan aset-aset lainnya agar tidak disalahgunakan pelaku-pelaku kejahatan sebagaimana terjadi dalam kasus ini," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyampaikan rumah penampungan korban TPPO di wilayah Lampung yang milik anggota polisi yang disewakan kepada orang lain yang sudah ditetapkan sebagai tersangka perdagangan manusia.

Rumah itu berlokasi di Jalan Padat Karya, Gang H Anwar, Kecamatan Rajabasa Raya. Sejak Kamis (8/6) pagi, kondisi rumah itu telah disegel. Di dalam rumah tersebut, polisi menemukan 24 calon pekerja migran In-

donesia asal Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menjadi korban TPPO untuk dikirim ke Timur Tengah. "Yang jelas saat ini rumah itu diduga milik pamen Polda Lampung, yang disewakan kepada tersangka yang telah diamankan," ucap Ramadhan saat ditemui di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat (9/6) lalu.

Ramadhan mengatakan, saat ini temuan itu sedang dalam proses pendalaman oleh Bidang Propam Polda Lampung. Dia menambahkan, pihak Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri juga akan memberikan asistensi terhadap proses pendalaman yang dilakukan Polda Lampung.

Lebih lanjut, Ramadhan juga menekankan komitmen Polri untuk menindak tegas siapapun pihak yang terlibat TPPO, termasuk jika ada anggota berpangkat apapun yang terlibat. "Jadi sudah dikordinasikan, penanganan masih Polda Lampung. Mabes Polri memberikan asistensi terhadap kasus ini," ujarnya. • **lus**

Pencuri Spesialis Ganjal ATM Ditangkap

TANGERANG (IM) - AR (40), tersangka pembobol ATM dengan modus ganjal ATM, ditangkap jajaran Polsek Pinang, Polres Metro Tangerang Kota. Salah satu tersangka berhasil kabur saat disergap polisi. Kapolsek Tangerang Jaya, Pinang, Karang Tengah, Kota Tangerang dan J (60) warga Palmerah, Jakarta Barat. Keduanya mengalami pencurian uang dari ATM di lokasi yang sama dengan waktu berbeda.

"Kejadian itu pada 16 Februari 2023 pukul 18.00 WIB dan 12 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di ATM Center Rest Area KM. 14.0 arah Merak-Jakarta Kelurahan Kunciran Jaya, Pinang, Kota Tangerang," kata Hendi dalam keterangannya, Kamis (15/6).

Saat itu korban yang hendak bertransaksi di mesin ATM kesulitan memasukkan kartunya dan terjadi kendala. Kartu ATM tersebut tidak bisa dimasukkan secara utuh dan tidak bisa dicabut. Kemudian pelaku datang menawarkan diri untuk membantu korban. Namun rupanya tanpa sadar, kartu ATM korban ditukar dan juga memberi akses PIN pada pelaku.

"Saat itu lalu datang dua yang diduga pelaku mencoba menawarkan diri untuk membantu. Pada saat membantu

tersebut ternyata menukar ATM-nya, dan korban terbuju untuk memencet PIN yang bisa digunakan untuk mengakses ATM tersebut," ucapnya.

Hendi menambahkan, korban atas nama BSF (66) warga Karang Tengah, Kota Tangerang mengalami kerugian hingga Rp95 juta raib dari tabungannya dengan cara ditransfer ke nomor rekening yang korban tidak ketahui.

"Pelaku ditangkap oleh tim opsional Reskrim Pinang yang sedang melaksanakan Patroli 3 C di kawasan Res Area Km 14.0, anggota menerima laporan dari pihak keamanan bahwa adanya orang yang diduga pelaku pencurian dengan modus ganjal ATM di lokasi, korbannya atas nama Jumeri (60) saat bertransaksi dikelabui pelaku dengan modus yang sama," jelas Kapolsek.

Tersangka diamankan bersama barang bukti sejumlah ATM dari berbagai bank dan tusuk gigi sebagai alat untuk mengganjal. Atas perbuatannya pelaku di jerat dengan pasal 363 KUHPidana tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Saat ini masih proses pengembangan, pencarian pelaku yang belum tertangkap dan identifikasi pemilik atm yang ditemukan.

"Pelaku disangkakan dengan pasal 363 KUHP, ancaman hukumannya 5 tahun penjara," tutur Hendi. • **lus**

FOTO: TMC



SANTUNAN KEPADA KELUARGA ANGGOTA POLRI

Dalam rangka Hari Bhayangkari ke-77 Tahun 2023 Polri Sat PJR Dit Lantas Polda Metro Jaya pada Kamis (15/6) memberikan santunan kepada keluarga anggota Polri Dit Lantas yang telah tutup usia dalam tugas.

Bareskrim Periksa Orangtua Dito Mahendra Terkait Kepemilikan Sejumlah Senpi Ilegal

JAKARTA (IM) - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan kepemilikan senjata api (senpi) ilegal dengan tersangka Dito Mahendra.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, pada hari ini, Kamis (15/6), penyidik bakal memeriksa orangtua Dito Mahendra.

"Hari Kamis, 15 Juni 2023, akan dilakukan orangtua MDS alias DM," kata Ramadhan.

Selain itu, Bareskrim Polri pada Jumat (16/6) akan memeriksa Ketua RT dari lingkungan tempat Dito Mahendra tinggal.

Bareskrim Polri menetapkan Dito Mahendra sebagai tersangka kasus senpi ilegal, berdasarkan gelar perkara pada 17 April 2023. Dito disangka melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang (UU) Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Adapun Pasal itu berbunyi, 'tanpa hak mema-

sukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak'.

Nama Dito sudah dimasukkan ke Daftar Pencarian Orang (DPO).

Bareskrim Polri saat ini sudah meningkatkan status ke penyidikan terkait dengan pengusutan pihak-pihak yang diduga membantu menyembunyikan Dito Mahendra dalam pelariannya dari jajaran polisi selama ini.

Penyidikan tersebut, berdasarkan dengan Pasal 221 KUHP. Bunyinya 'distruction of justice adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang terbukti berupaya untuk menghalang-halangi suatu proses hukum'. • **lus**

Jelang Putusan Sistem Pemilu, MK Dijaga Ketat Brimob Bersenjata

JAKARTA (IM) - Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat dijaga ketat oleh pasukan kepolisian bersenjata lengkap, Kamis (15/6) jelang sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sidang sediaan akan berlangsung pukul 09.30 WIB. Nampak, puluhan Brimob dikerahkan dalam penjagaan gedung ini. Di lokasi terlihat juga 2 mobil baja taktis jenis wlf, dan 1 mobil baja taktis jenis Baracuda. Sejumlah anggota Polisi tampak berjaga-jaga.

Gugatan *judicial review* ini diajukan enam orang pemohon pada 14 November 2022. Mereka adalah Demas Brian Wicaksono (kader PIDIP), Yuwono Pintadi (kader Nasdem), Fahrurrozi dan Ibnu Rachman Jaya.

Hal ini disampaikan dalam akun Instagram pribadinya @dennyindrayana99.

"Pagi ini, saya mendapat-

Selain itu, ada juga Riyanto dan Nono Marijono. Keenamnya juga menunjuk Sururudin dan Iwan Mafutukhan sebagai kuasa hukumnya. Mereka meminta MK mengembalikan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.

Kabar bocoran putusan MK sempat menghebohkan publik. Di mana, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenumham) Denny Indrayana mengungkap, adanya informasi perihal putusan MK akan mengembalikan pemilu pada sistem proporsional tertutup.

"Info tersebut menyatakan, komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting," katanya.

Diketahui, sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilu di mana pemilih memilih langsung wakil-wakil legislatifnya. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya memilih partai politiknya saja. • **lus**

FOTO: IM/FRANS



PEMBINAAN ROHANI DI POLDA METRO JAYA

Dalam rangka Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-77, Biro Sumber Daya Manusia Polda Metro Jaya mengadakan pembinaan rohani Islami di Masjid Al-Kautsar Polda Metro Jaya, Kamis (15/6) subuh. Hadir Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suyudi Ari Seto dengan penceramah Habib Muhammad Bagir bin Mustofa Al-Habsyi.